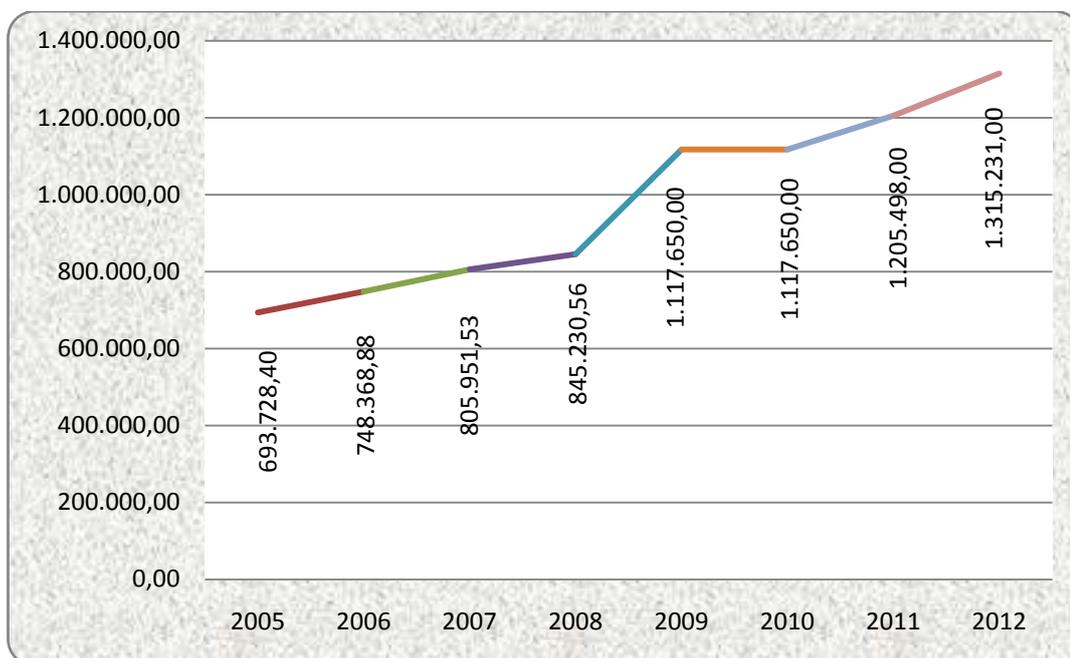


BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Kondisi Umum Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau

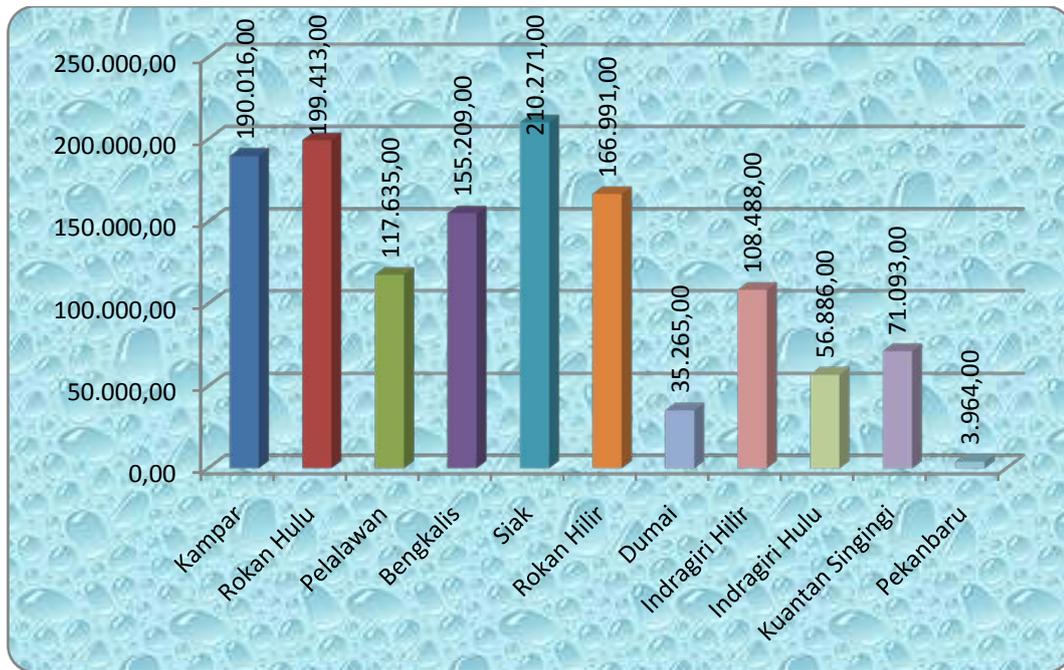
Luas areal perkebunan rakyat di Provinsi Riau terus meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2005 luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 693.728,40 Ha dan meningkat menjadi 1.315.231,00 Ha pada tahun 2012 atau selama periode tersebut rata-rata setiap tahunnya luas lahan perkebunan sawit rakyat di Provinsi Riau tumbuh 9,57%. Berdasarkan kabupaten/kota dalam periode yang sama pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 30,41%.



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 2 :
Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
Di Provinsi Riau Tahun 2005-2012

Perkebunan kelapa sawit telah menjadi komoditi perkebunan yang primadona di Provinsi Riau. Pengembangannya telah merata diseluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Tiga kabupaten dengan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat terluas pada tahun 2012 adalah Kabupaten Siak seluas 210.271,00 Ha, Kabupaten Rokan Hulu seluas 199.413,00 Ha, dan Kabupaten Kampar 190.106,00 Ha. Membainnya harga jual Tanda Buah Segar dan keuntungan investasi dari perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Hal ini menyebabkan pengembangan lahan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau tidak hanya dikembangkan pada wilayah kabupaten saja namun saat ini telah berkembang pada wilayah kota, seperti Kota Dumai dan Pekanbaru. Pada tahun 2012 luas lahan perkebunan sawit di Kota Dumai seluas 35.265 Ha dan Kota Pekanbaru seluas 3.964 Ha.

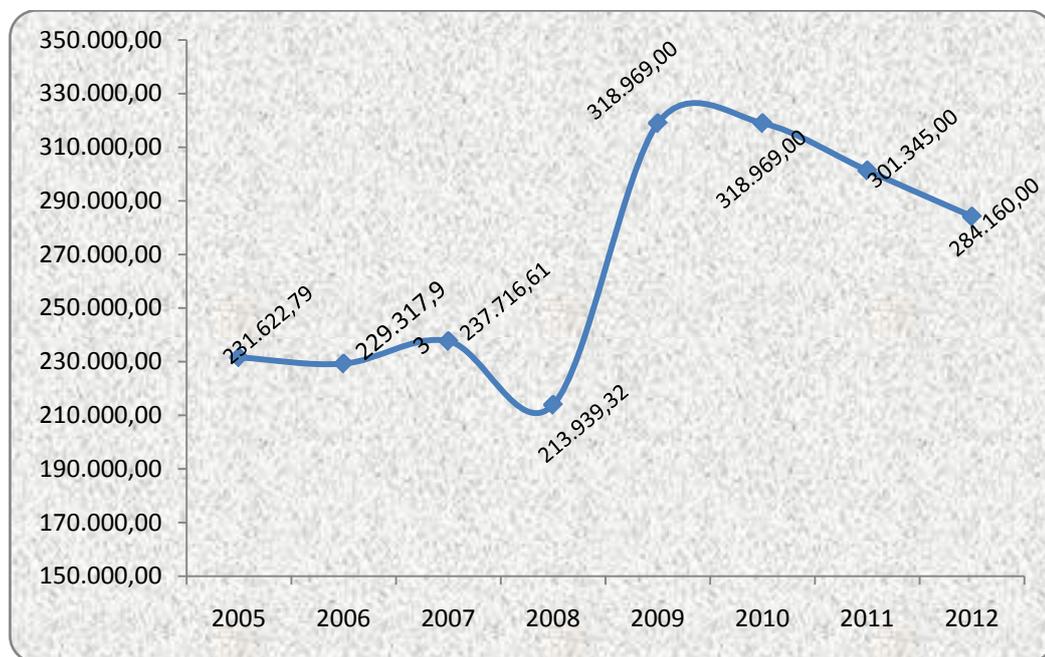


Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 3 :
Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau dapat dikelompokkan dalam tiga status tanaman. Pertama, kebun kelapa sawit rakyat dalam kondisi Tanaman Belum Menghasilkan, kedua dalam kondisi Tanaman Menghasilkan, dan ketiga dalam kondisi Tanaman Tua Rusak (TTR).

Luasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kondisi tanaman belum menghasilkan perkembangannya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2005 luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 231.622,79 Ha dan meningkat menjadi 237.716,61 Ha pada tahun 2007. Namun demikian, memasuki tahun 2008 gairah masyarakat untuk mengembangkan lahan kelapa sawit pada periode ini mengalami penurunan, sehingga luas tanaman belum menghasilkan turun menjadi 213.939,32 Ha. Pada tahun berikutnya luas lahan tanaman belum menghasilkan lebih tinggi dari tahun 2008 walaupun kecenderungannya menurun sehingga ditahun 2012 luas tanaman belum menghasilkan seluas 284.160 Ha.



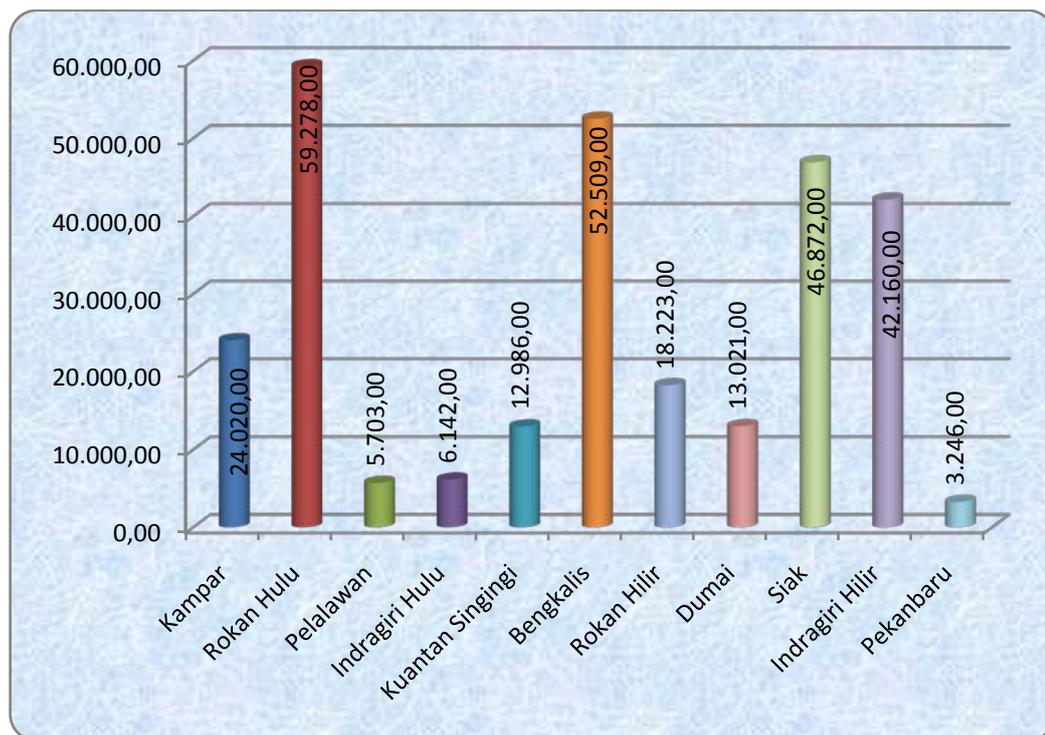
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 4 :

Luas Lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau Tahun 2005-2012

Pada tahun 2012 wilayah di Provinsi Riau yang memiliki kebun kelapa sawit rakyat dengan tanaman belum menghasilkan terluas adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 59.278 Ha diikuti oleh Kabupaten Bengkalis seluas 52.509 Ha dan Kabupaten Siak seluas 46.872 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pertambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat terus mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

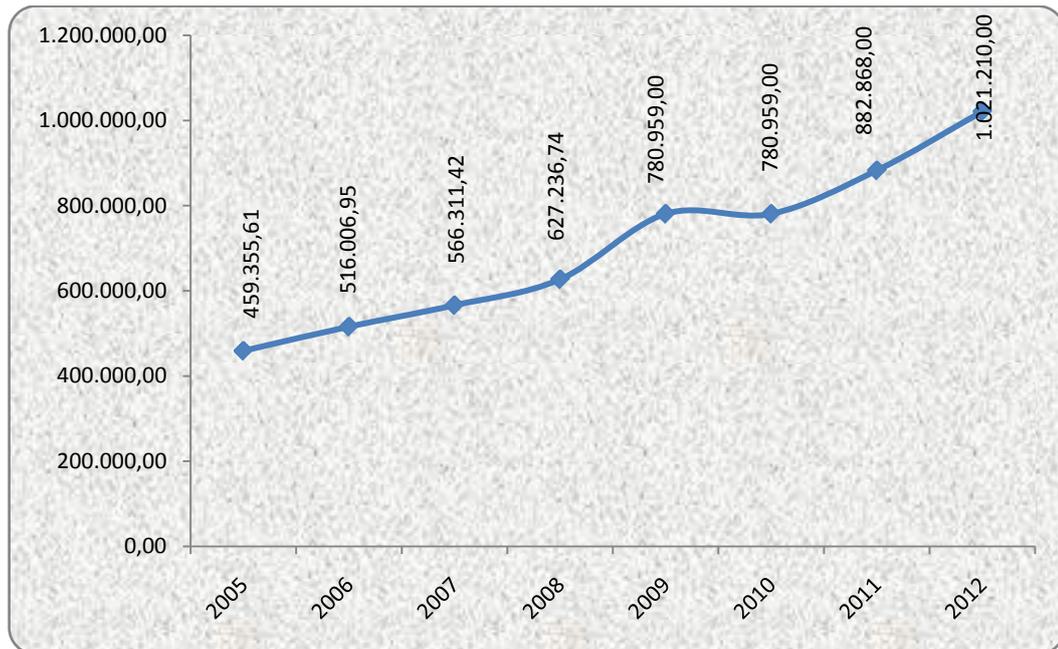
Wilayah di Provinsi Riau yang sudah berkurang bagi pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk tanaman belum menghasilkan antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 5 :
Luas Lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Riau Tahun 2012

Luas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat yang telah menghasilkan selama priode 2005-2012 di Provinsi Riau setiap tahunnya tumbuh sebesar 12,09%. Pada tahun 2005 luasnya mencapai 459.355,61 Ha dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.021.210 Ha.

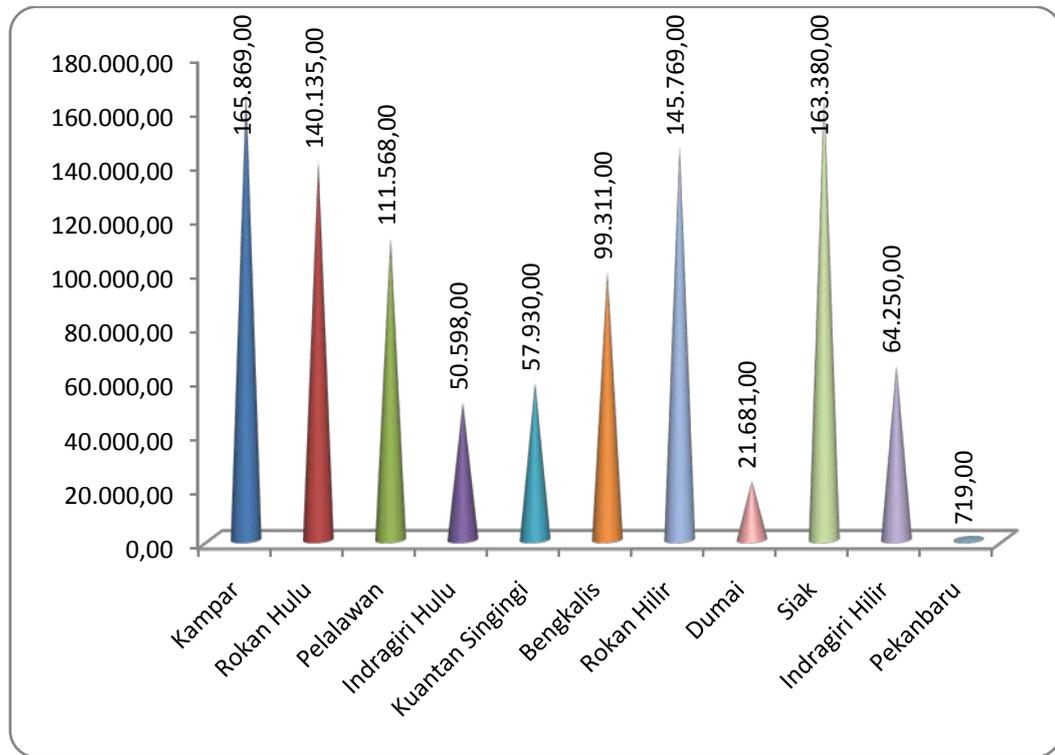


Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 6 :

Luas Lahan Tanaman Menghasilkan (TM) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau Tahun 2005-2012

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau, lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan tanaman menghasilkan yang terluas berada di Kabupaten Kampar seluas 165.869 Ha yang diikuti oleh Kabupaten Siak seluas 163.380 Ha dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 145.769 Ha. Sedangkan wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat dengan tanaman menghasilkan terendah di Kota Pekanbaru seluas 719 Ha.

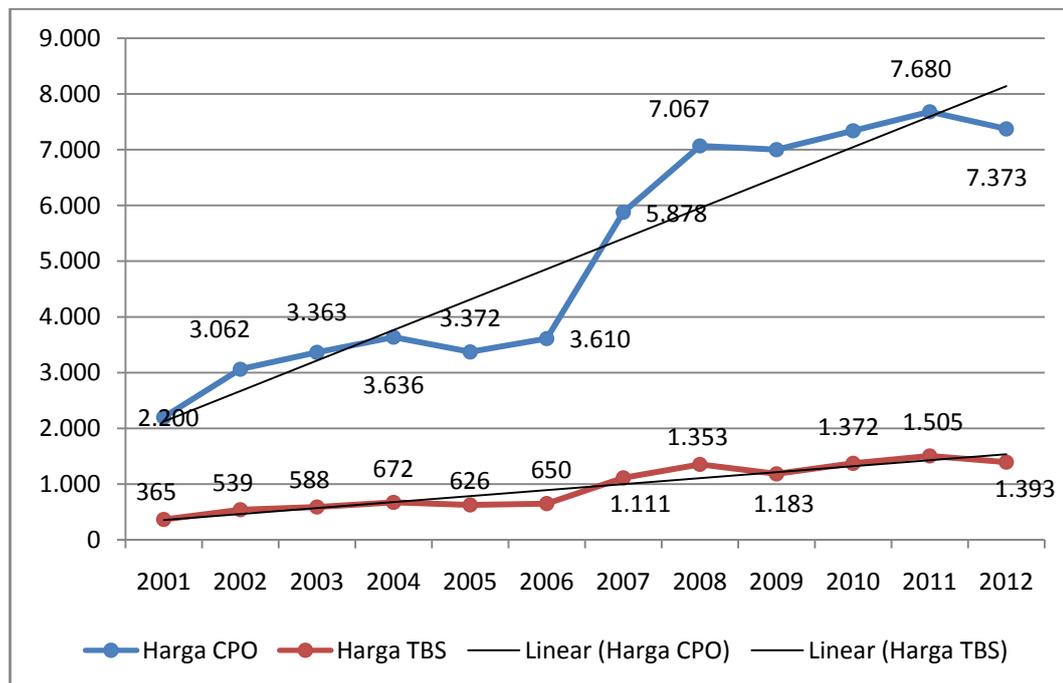


Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 7 :

Luas Lahan Tanaman Menghasilkan (TM) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2012

Meningkatnya luas tanaman kelapa sawit rakyat terutama yang telah menghasilkan juga diikuti dengan meningkatnya harga tandan buah segar (TBS). Pada tahun 2001 harga tandan buah segar di tingkat petani rata-rata seharga Rp.365 per kilogram. Kemudian pada tahun 2012 rata-rata harga tandan buah segar di tingkat petani meningkat menjadi Rp. 1.393 per kilogram. Dengan demikian rata-rata harga TBS ditingkat petani selama periode tersebut tumbuh sebesar 12,94%. Meningkatnya luas lahan tanaman menghasilkan yang diikuti dengan meningkatnya harga tandan buah segar tentunya dapat meningkatkan gairah petani kelapa sawit rakyat dalam mengusahakan kebunnya. Namun demikian, peningkatan penerimaan dari usaha tani kelapa sawit tidak jarang diikuti pula dengan peningkatan biaya input seperti pupuk dan lainnya.

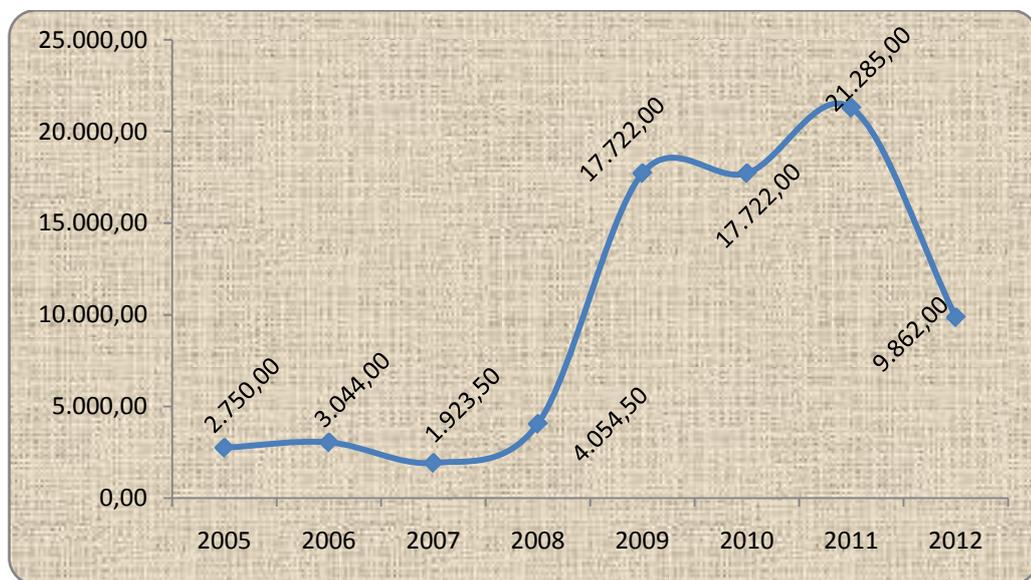


Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 8 :
Perkembangan Harga TBS dan CPO
Di Provinsi Riau Tahun 2001-2012

Sejauh ini dari mata rantai agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat yang mampu dihasilkan pada tingkat petani adalah menghasilkan tandan buah segar. Sementara turunan berikutnya mulai dari CPO dan seterusnya dikuasai oleh perusahaan besar. Sehingga nilai tambah yang diperoleh petani dari kegiatan agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat masih merupakan yang terkecil. Selain itu, tidak jarang petani kelapa sawit rakyat juga menerima harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kesenjangan antara nilai yang diterima petani dengan perusahaan terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2001 ketika harga TBS ditingkat petani sebesar Rp. 365 per kilogram, harga CPO sebesar Rp. 2.200. jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 dimana harga TBS ditingkat petani sebesar Rp. 1.393 per kilogram, harga CPO sebesar Rp.7.373.

Sebagian tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau status tanamannya dalam kondisi tanaman tua rusak. Pada tahun 2005 luas perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kondisi tanaman tua rusak seluas 2.750 Ha dan meningkat menjadi 3.044 Ha pada tahun 2006. Luas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kondisi tanaman tua rusak tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan 2011. Dimana pada tahun 2009 luas tanaman tua rusak mencapai 17.722 Ha dan pada tahun 2011 mencapai 21.285 Ha.

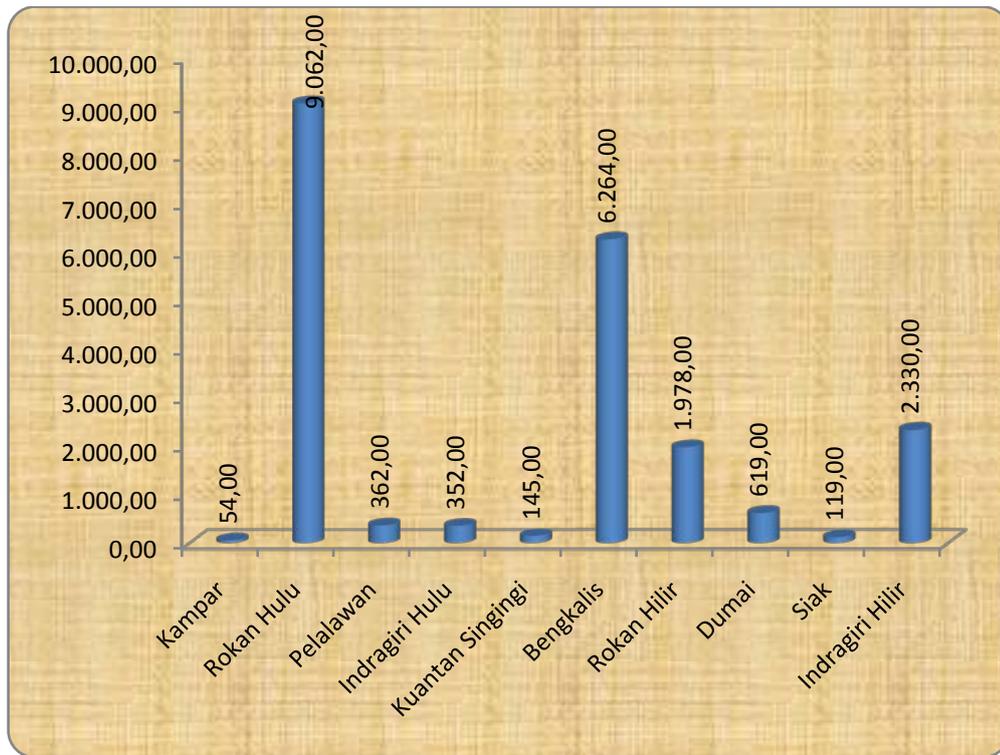


Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 9 :

Luas Lahan Tanaman Tua Rusak (TTR) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau Tahun 2005-2012

Hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau pada tahun 2011 terdapat perkebunan kelapa sawit rakyat dengan status tanaman tua rusak kecuali Kota Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat dengan tingkat tanaman tua rusak tertinggi yaitu seluas 9.062 Ha diikuti oleh Kabupaten Bengkalis seluas 6.264 Ha dan Indragiri Hilir 2.330 Ha.



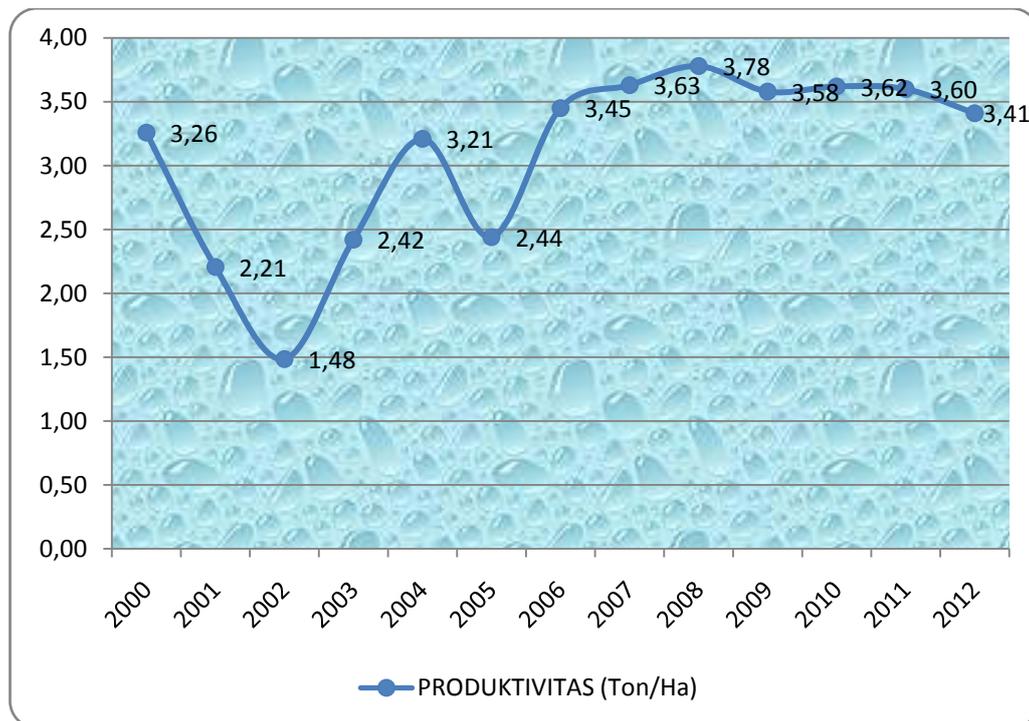
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 10 :

Luas Lahan Tanaman Tua Rusak (TTR) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011

Seiring dengan meningkatnya luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan status tanaman tua rusak, produktivitas lahan tanaman kelapa sawit rakyat juga sudah mulai menurun. Selama periode 2001-2012 tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 rata-rata setiap lahan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau per hektarnya mampu menghasilkan 3,26 ton. Namun prestasi ini terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2002 produktivitas kebun kelapa sawit rakyat turun menjadi 1,48 ton per hektar. Memasuki tahun 2003 produktivitas lahan kebun kelapa sawit rakyat mulai meningkat menjadi 2,42 ton per hektar dan puncaknya terjadi pada tahun 2004 dengan produktivitas sebesar 3,21 ton per hektar.

Produktivitas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau pada tahun 2005 kembali mengalami penurunan hingga 2,44 ton per hektar. Penurunan produktivitas lahan kebun kelapa sawit rakyat ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2006 produktivitas lahan kebun kelapa sawit rakyat mulai meningkat menjadi 3,45 ton per hektar dan sampai dengan tahun 2008 produktivitas lahan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau sebesar 3,78 ton per hektar. Kondisi pasar internasional yang mengalami krisis pada periode akhir 2008 dan awal 2009 juga turut berimbas terhadap produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Disisi lain, kondisi kebun kelapa sawit rakyat yang sebagian diantara telah memasuki usia tua telah turut menurunkan produktivitas. Produktifitas kebun kelapa sawit rakyat pada tahun 2011 sebesar 3,60 ton per hektar pada tahun 2012 kembali turun menjadi 3,41 ton per hektar.



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Gambar 11 :
Produktifitas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
Di Provinsi Riau Tahun 2000 - 2012

5.1.2. Kesiapan Petani Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit

A. Karakteristik Reponden

Berdasarkan data karakteristik umur responden penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya usia petani kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki usia tua tidaklah dalam usia muda lagi. Sebagian besar (69,17%) usia mereka sudah diatas 41 tahun. Struktur umur petani pada kelompok umur diatas 41 tahun yang paling banyak adalah pada kelompok umur 48 -53 tahun sebanyak 29,17% diikuti kelompok umur 54-69 tahun sebanyak 16,67%. Pada struktur usia kerja yang demikian berarti petani akan menghadapi masa pensiun atau bahkan sudah pensiun tinggal menikmati masa tuanya. Bahkan diantara petani responden usianya sudah diatas 60 tahun sebanyak 12,50%. Sedangkan petani kelapa sawit rakyat yang kebunnya telah memasuki masa peremajaan dengan usia dibawah 41 tahun tidak lebih dari 30,83%. Pada kondisi usia yang tidak muda lagi tentu hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja dari petani.

Tabel 1 : Karakteristik Umur Responden

Umur	Frekuensi	%
30-35	21	17,50
36-41	16	13,33
42-47	13	10,83
48-53	35	29,17
54-59	20	16,67
60-65	9	7,50
66-71	4	3,33
72-77	2	1,67
Jumlah	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

Disamping usia petani yang tidak lagi muda, pada umumnya (62,50%) tingkat pendidikan responden adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Pada tingkat pendidikan formal yang demikian, maka jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan pada saat peremajaan kebun dilaksanakan adalah jenis pekerjaan yang sifatnya informal dimana lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik. Faktor usia dan tingkat pendidikan yang demikian, tentunya menjadi kendala bagi petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kedepan.

Pendidikan yang diperoleh petani baik yang melalui pendidikan formal maupun non formal merupakan modal dasar bagi petani dalam mengembangkan dirinya. Pendidikan yang dimiliki seseorang juga dapat menentukan jenis pekerjaan yang akan diperolehnya. Tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung menjadikan seseorang mengeluti jenis pekerjaan yang lebih kasar dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan petani yang lebih baik, paling tidak akan mempengaruhi cara pandang dan pola pikir mereka terhadap konsep pertanian yang akan dilakukan terlebih lagi dalam menghadapi masa peremajaan kebunnya.

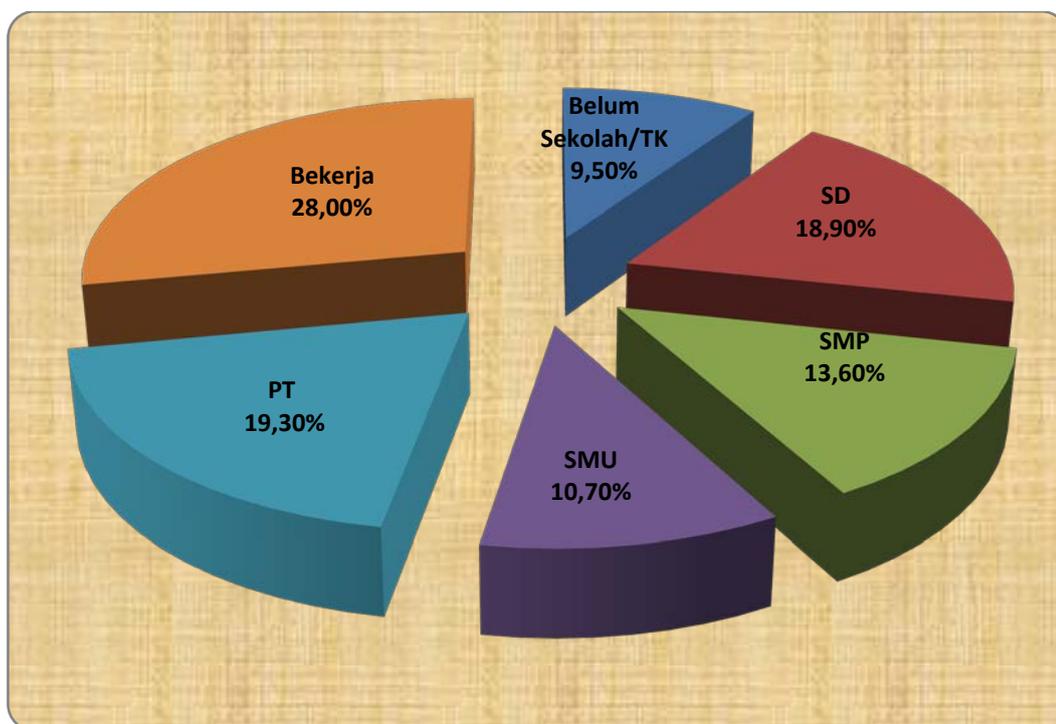
Bagi petani dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi tentunya akan memiliki alternatif pilihan jenis pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan yang lebih banyak. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa dari responden petani kelapa sawit yang telah memasuki usia tua dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi sebanyak 6,7% dan pendidikan SMU sebanyak 30,8%.

Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	%
Tidak Tamat SD	5	4,2
SD	24	20,0
SMP	46	38,3
SMU	37	30,8
Perguruan Tinggi	8	6,7
Jumlah	120	100,0

Sumber : Diolah dari data lapangan

Saat ini petani kelapa sawit rakyat yang kebunnya memasuki usia tua juga dihadapkan pada struktur aktivitas anggota keluarga yang sebagian besar (72,00%) berada pada usia sekolah. Disisi lain hanya sebanyak 28,00% dari anggota keluarga petani kelapa sawit yang lahannya telah memasuki masa peremajaan dengan aktivitas sehari-hari adalah bekerja. Struktur aktivitas anggota keluarga yang pada umumnya sekolah menyebabkan alokasi pengeluaran rumah tangga petani kelapa sawit yang kebunnya telah memasuki usia tua akan terkonsentrasi untuk membiayai pengeluaran pendidikan anggota keluarganya. Pada saat peremajaan kebun milik petani dilaksanakan tentunya hal tersebut akan menghilangkan sumber pendapatan yang selama ini dijadikan tumpuan hidup keluarga. Kondisi ini menyebabkan dilema bagi petani untuk segera melakukan peremajaan kebunnya.



Sumber : Diolah dari data lapangan

Gambar 12 :
Karateristik Aktivitas Anggota Keluarga

B. Kesiapan Modal Petani Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit

1. Lahan (Tanah)

Setiap usaha perkebunan akan menghadapi siklus mulai tahap penanaman, produksi hingga tanaman menjadi tua dan harus diremajakan untuk dilakukan penanaman kembali. Lahan perkebunan kelapa sawit merupakan media utama untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit selama siklus hidupnya sekaligus aset utama sebagai sumber penghidupan bagi petani kelapa sawit rakyat. Semakin luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh petani dapat mencerminkan status sosial ekonomi yang lebih baik terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Namun demikian, sesuai dengan siklus tersebut saat ini lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dimiliki oleh petani sebagian telah memasuki masa tua dengan produktivitas kebun kelapa sawit yang sudah mulai menurun dan masih tetap dipertahankan untuk diambil hasilnya.

Pada umumnya lahan kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki usia tua tersebut diperoleh petani melalui program transmigrasi yang dikembangkan oleh pemerintah sekitar tahun 1980-an. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya (70,83%) petani memiliki luas lahan kebun kelapa sawit yang telah memasuki usia tua sekitar 1- 2 Ha. Selain itu, sebanyak 20% petani memiliki luas lahan kebun kelapa sawit yang sudah tua sekitar 3-4 Ha. Sedangkan petani yang memiliki kebun yang sudah tua diatas 4 Ha sebanyak 9,17%.

Tabel 3 : Rata-rata Luas Lahan Yang Akan di Remajakan

Luas	Frequency	%
1 – 2	85	70,83
3 – 4	24	20,00
> 4	11	9,17
Jumlah	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

Kondisi lahan kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki usia untuk diremajakan kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Tinggi batang kelapa sawit rata-rata sudah diatas 12 meter sehingga untuk mengambil hasil panennya membutuhkan galah yang lebih panjang dan relatif lebih sulit. Dari seratusan batang pohon kelapa sawit dalam setiap kaplingnya hanya tinggal beberapa batang saja yang menghasilkan tanda buah segar. Biaya perawatan yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh membuat petani enggan untuk melakukan pemupukan. Kondisi ini mendorong petani lebih cenderung untuk mengambil hasil kebunnya tanpa melakukan perawatan. Keputusan petani yang demikian cenderung menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas kebun kelapa sawit rakyat dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan usaha tani kelapa sawit yang diterima oleh petani.



Gambar 13 :

Kondisi Lahan Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Pada umumnya (93,33%) bukti kepemilikan lahan kebun kelapa sawit yang telah memasuki usia tua tersebut adalah berupa sertifikat. Selain itu, bukti kepemilikan lahan juga berupa SKT dari camat/lurah sebanyak 5,83% dan bukti lainnya sebanyak 0,83%.

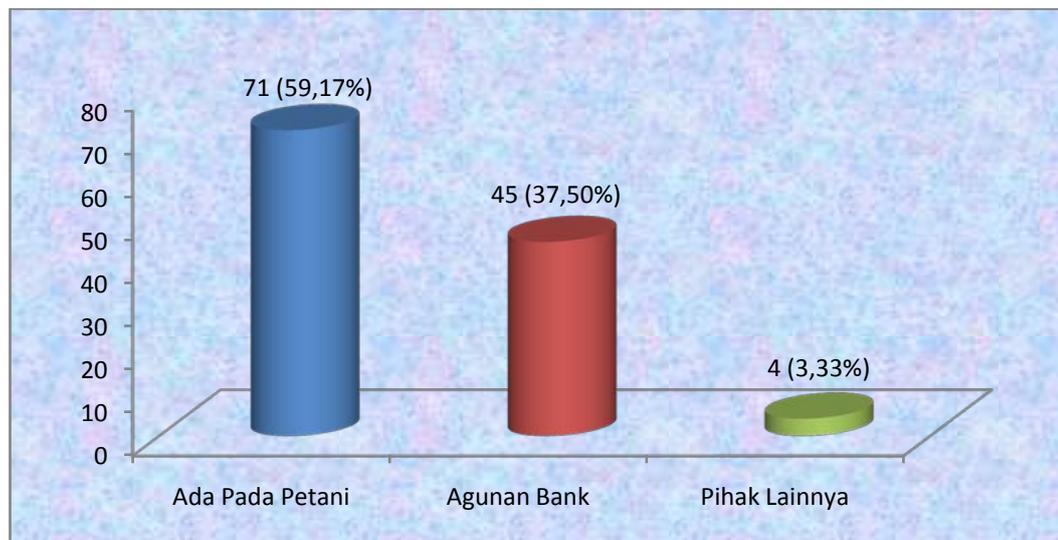
Tabel 4 : Bentuk Bukti Kepemilikan Lahan Yang Akan di Remajakan

Keterangan	Frequency	Percent
Sertifikat	112	93,33
SKT Camat/Lurah	7	5,83
Lainnya	1	0,83
Total	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

Pada umumnya (59,17%) penguasaan bukti kepemilikan dari lahan kebun kelapa sawit yang sudah tua tersebut berada pada petani. Meningkatnya kebutuhan petani baik yang bersifat konsumtif maupun investasi mendorong petani untuk mengadaikan surat-surat lahan mereka sebagaimana agunan pinjaman di bank maupun pihak yang lain. Berdasarkan data survey lapangan menunjukkan sekitar 37,50% surat-surat lahan yang saat ini telah memasuki masa tua oleh para petani dijamin sebagai agunan pinjaman mereka di bank. Selain itu, sekitar 3,33% surat-surat lahan yang telah memasuki masa tua tersebut oleh petani juga dijadikan sebagai agunan pinjaman pada pihak lainnya seperti koperasi, dan pihak lainnya.

Penguasaan surat-surat lahan yang masih menjadi agunan di bank maupun pihak lainnya tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah apabila dibutuhkan sebagai jaminan bagi upaya peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Mengingat untuk dapat menebus surat-surat lahan tersebut petani harus menyediakan sejumlah dana segar untuk melunasi pinjaman yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan periode waktu yang cukup bagi para petani untuk dapat mengambil surat lahan yang telah dijadikan jaminan.



Sumber : Diolah dari data lapangan

Gambar 14 :
Penguasaan Bukti Kepemilikan Lahan Kelapa Sawit
Yang Akan Diremajakan

Kesiapan petani dalam menghadapi peremajaan kebun kelapa sawit yang telah tua memiliki respon yang berbeda-beda. Pada umumnya (42,50%) petani kelapa sawit rakyat menginginkan untuk melakukan peremajaan kebunnya dengan pola kemitraan melalui koperasi dengan perbankan. Bagi petani yang telah mempersiapkan dari awal dana untuk peremajaan kebun dan memiliki kemampuan permodalan yang cukup untuk membangun kebun kembali, sebanyak 11,67% petani memilih melakukan peremajaan dengan modal sendiri. Sedangkan bagi petani yang telah memiliki dana untuk peremajaan namun belum cukup untuk melaksanakan mereka memilih melakukan peremajaan dengan pola modal sendiri ditambah pinjaman sebanyak 18,33%. Namun demikian, masih cukup sebanyak (25,00%) petani yang belum membuat keputusan atau masih ragu-ragu untuk menentukan pola peremajaan yang dipilihnya. Tanggapan yang muncul dari para responden apabila mereka memilih pola kemitraan mereka harus mengangsur cicilan yang relatif besar dengan jangka waktu yang relatif lama. Sementara jika harus melakukan peremajaan sendiri mereka memiliki keterbatasan dana.

Tabel 5 : Kesiapan Petani Untuk Melaksanakan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit

Keterangan	Frequency	Percent
Modal Pribadi	14	11,67
Modal Pribadi + Pinjaman	22	18,33
Bermitra Dengan Koperasi/Perbankan	51	42,50
Program Pemerintah	3	2,50
Belum ada keputusan/Ragu-ragu	30	25,00
Total	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

2. Kepemilikan Aset di Luar Kebun yang di Remajakan

Kesiapan modal para petani untuk melakukan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit dapat bersumber dari petani sendiri dan dari pihak lain. Usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalani petani selama ini telah memberikan sumber penghidupan bagi keluarganya yaitu berupa peningkatan pendapatan. Alokasi pendapatan keluarga petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada akhirnya dapat mencerminkan kesiapan modal yang bersumber dari petani sendiri. Pendapatan yang diperoleh petani tersebut akan dialokasikan untuk dua hal, pertama pengeluaran yang bersifat konsumsi barang habis dan kedua pengeluaran yang bersifat tabungan atau meningkatkan aset.

Selain memiliki aset berupa lahan perkebunan yang saat ini telah memasuki masa untuk diremajakan, para petani juga memiliki aset lainnya. Aset yang dimiliki para petani tersebut berupa aset tidak bergerak dan aset bergerak. Aset yang bergerak misalnya seperti mobil dan kendaraan roda dua. Sedangkan aset yang tidak bergerak misalnya surat berharga, rumah, dan SK PNS/Karyawan. Hasil survey menunjukkan bahwa dalam rangka menghadapi proses peremajaan dan masa tunggu pada umumnya (61,67%) aset yang dapat dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah/bangunan/lahan. Selain itu, berupa aset kendaraan (30%), dan SK PNS/Karyawan (5,83%), serta surat-surat berharga lainnya (2,50%).

Tabel 6 : Kepemilikan Aset yang dapat dijadikan Jaminan Selain Lahan yang akan Diremajakan

Keterangan	Frequency	Percent
Sertifikat Rumah/Bangunan/Lahan	74	61,67
BPKB Kendaraan	36	30,00
SK PNS/Karyawan	7	5,83
Surat-surat berharga lainnya	3	2,50
Total	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

Informasi yang diperoleh dari Key Informan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa para petani mengharapkan selama masa peremajaan berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat baik itu berupa bantuan dana dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan usaha seperti warung, peternakan, perikanan serta beasiswa.

Beberapa kepemilikan asset yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk peremajaan kebun kelapa sawit antara lain : Rumah, kendaraan roda empat dan roda dua dan lahan sawit mereka yang sudah mulai panen. Namun dari hasil wawancara mereka sangat keberatan jika itu dilakukan mereka lebih cenderung memberi agun sertifikat mereka dengan kesepakatan pembayaran 80-20 persen selama 5 tahun dan 100 persen selama 3 tahun. Dalam hal pengembalian pinjaman 70-30 persen.

Faktor modal merupakan faktor yang sangat memberatkan petani ketika peremajaan akan dilakukan. Wawancara yang dilakukan kepada petani, mereka rata-rata tidak akan sanggup melakukan peremajaan apabila dilaksanakan dengan modal sendiri. Petani hanya melakukan simpanan pada Kelompok Tani dan melalui KUD, adanya tabungan yang merupakan persiapan yang dimiliki petani untuk meminimalisir resiko dan masalah ketika peremajaan dilakukan. Modal yang dibutuhkan untuk peremajaan kebun kelapa sawit akan digunakan untuk penumbangan dan pemancangan batang pohon sawit, pembelian bibit siap tanam, biaya untuk pemancangan dan penanaman, serta biaya pemupukan dan perawatan

3. Dukungan kelembagaan petani

Selama ini para petani perkebunan kelapa sawit rakyat yang memasuki masa usia tua pada umumnya telah tergabung dalam kelompok tani sekaligus sebagai anggota koperasi. Berbagai upaya telah dilakukan petani bersama pengurus koperasi dan pemerintah desa dalam menghadapi peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Namun demikian pada umumnya koperasi dan kelompok tani serta petani belum ada keputusan yang bersifat kolektif tentang bagaimana model peremajaan yang disepakati bersama.



Gambar 15 :

Infrastruktur kelembagaan ekonomi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara lapangan terhadap petani dan pengurus koperasi serta aparat desa di Kabupaten Siak diperoleh informasi bahwa koperasi telah membuat program tabungan untuk menghadapi masa *replanting*, namun demikian tidak semua petani mengikuti program tersebut. Program tabungan tersebut dalam bentuk IDAPERTABUN. Saat ini nilai tabungannya sudah mencapai sekitar Rp. 7.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000. Selain itu, selama ini petani sebagai anggota koperasi ada iuran anggota yang setiap bulannya sekitar Rp. 200.000 dan sekarang rata-rata nilainya sudah mencapai sekitar Rp. 10.000.000. Bahkan sekitar 70% anggota koperasi sudah memiliki tabungan rata-rata Rp. 20.000.000.

Kemampuan untuk meremajakan kebun kelapa sawit secara mandiri terutama sangat ditentukan oleh kemampuan modal yang dimiliki oleh petani kelapa sawit rakyat. Informasi yang diperoleh dari pengurus koperasi menyebutkan bahwa secara ekonomi sekitar 60% petani anggota koperasi mampu untuk melakukan peremajaan secara mandiri sedangkan sekitar 40% petani anggota koperasi tidak mampu untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawitnya secara mandiri. Namun demikian, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk proses peremajaan kebun kelapa sawit rakyat tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, lebih kurang empat tahun sampai dengan buah menghasilkan. Mungkin jika hanya sampai pada biaya penanaman saja hampir seluruh petani mampu untuk melakukan peremajaan secara mandiri. Tetapi karena memang waktu yang dibutuhkan cukup panjang untuk proses peremajaan kebun kelapa sawit rakyat mulai dari proses pembersihan lahan sampai dengan kebun tanaman kelapa sawit menghasilkan. Maka, dari pihak koperasi tidak berani memutuskan secara sepihak memutuskan pola peremajaan kebun kelapa sawit rakyat yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, koperasi memberikan kebebasan kepada petani dan disisi lain tetap mencarikan sumber pendanaan (dana revitalisasi) untuk peremajaan kebun kelapa sawit terutama bagi 40% petani yang tidak sanggup melaksanakan replanting secara mandiri. Karena mereka umumnya tidak mempunyai lahan lain sehingga akan mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan biaya hidup selama menunggu sampai dengan kebun menghasilkan.

Permasalahan lain yang dihadapi petani kelapa sawit rakyat dalam memutuskan untuk melakukan peremajaan kebunnya adalah masih dirasa tingginya tingkat bunga pinjaman yang diberikan untuk modal selama peremajaan kebun berlangsung yaitu sekitar 14%. Untuk meringankan beban bunga tersebut beredar kabar ditengah petani dan pengurus koperasi bahwa untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat ada program dari pemerintah yang memberikan subsidi sekitar 7%. Informasi pemberian subsidi yang sampai ke petani juga belum clear apakah subsidi tersebut diterima proses peremajaan kebun kelapa sawit rakyat berlangsung (selama antara 3-4 tahun) atau selama kredit.

Belum jelasnya informasi tentang skim peremajaan kebun kelapa sawit rakyat yang diterima petani menyebabkan diantara mereka masih ragu untuk memutuskan pola peremajaan yang akan dipilih terutama dalam pemanfaatan dana revitalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dari berbagai pihak yang berkepentingan mungkin terutama dari tim dana revitalisasi agar dalam pelaksanaan peremajaan kebun tidak menimbulkan keributan atau masalah dibelakang hari. Sebetulnya petani kelapa sawit rakyat bersama kelompok tani dibawah naungan koperasi bukan tidak mau untuk segera melakukan peremajaan. Tetapi petani berfikir bahwa didalam peremajaan nanti petani akan kehilangan sumber ekonominya. Oleh karena itu, paling tidak pada waktu kehilangan ekonominya petani masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan adanya dana revitalisasi masyarakat menginginkan adanya penjelasan yang jelas, terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk seluruh pelaksanaan replanting. Sehingga diwaktu akad kredit nanti petani sudah mengetahui berapa nilainya hutang yang harus ditanggung. Disisi lain, apabila menggunakan dana revitalisasi tentunya petani kelapa sawit rakyat melalui koperasi harus bermitra dengan perusahaan. Masalah yang dikhawatirkan koperasi adalah apabila pola manajemen pengelolaan kebun 100% oleh perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan peran koperasi sudah tidak perlu lagi/berkurang, ekonomi masyarakat sudah tidak ada, mungkin tabungan anggota ditarik, perbankan sudah tidak mau memberikan modal karena tidak ada dukungan ekonomi dari anggota. Harapan koperasi, jika memang ada dukungan dana revitalisasi dan harus ada avalis, maka pola manajemen pengelolaan kebun tidak 100% dikelola perusahaan. Koperasi harus tetap diberikan peran yang luas seperti mungkin akan duduk bersama untuk kesepakatan bersama antara koperasi dengan perusahaan mitra yang saling menguntungkan. Sehingga lembaga kelompok tani masih eksis dan koperasi masih eksis dengan demikian untuk pupuk bisa ditangani koperasi. Jika perusahaan mitra bisa mengusahakan pupuk dengan harga bersaing, maka koperasi akan berusaha untuk tidak keluar dari perusahaan bermitra jika harga sama dan kualitas pupuk bagus. Sedangkan untuk item yang lain bisa dikerjakan secara bersama dalam posisi yang sejajar.

Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat sampai umur 1 tahun sekitar 35 juta dan dana terbesar adalah untuk penyediaan bibit. Masalah berikutnya yang muncul ketika koperasi memanfaatkan dana revitalisasi adalah lahan kebun kelapa sawit rakyat yang dilakukan peremajaan tidak boleh ditanami tanaman sela. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat dari PTP kepada pemerintah daerah yang menyatakan untuk program peremajaan kebun yang menggunakan dana revitalisasi tidak boleh ada tanaman sela, karena dapat merusak tanaman sawit. Oleh karena itu, dari pihak pemerintah daerah mencoba dengan pola pekarangan baik ikan lele atau ternak apa yang bisa tanaman lain yang bisa menambah penghasilan petani. Namun demikian, sebagian besar petani tetap menginginkan adanya tanaman tumpang sari dilahan yang diremajakan.

Berdasarkan informasi yang digali dari petani kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa replanting di Kabupaten Rokan Hulu juga menghadapi masalah yang relatif sama. Modal/investasi yang dimiliki oleh petani sangat minim sementara akses untuk mendapatkan modal melalui institusi perbankan masih sangat sulit sehingga peremajaan kebun menjadi sangat sulit dilakukan petani. Sumber modal yang telah dilakukan petani yakni melalui tabungan kelompok maupun IDAPERTABUN, tetapi dana tersebut masih jauh dari kekurangan untuk kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit, faktor modal merupakan faktor yang sangat memberatkan petani ketika peremajaan akan dilakukan. Wawancara yang dilakukan kepada petani, mereka rata-rata tidak akan sanggup melakukan peremajaan apabila dilaksanakan dengan modal sendiri. Dengan kondisi yang sangat minim ini petani secara umum menyatakan ketidakmampuan mereka melakukan peremajaan dengan biaya sendiri mereka sangat berharap dapat bermitra dengan pemerintah. Dalam hal pelaksanaan proses replanting petani yang kebunnya diremajakan menginginkan agar melibatkan mereka.

Para petani bersedia bukti kepemilikannya dijamin untuk peremajaan kebun kelapa sawit melalui mitra Koperasi Unit Desa (KUD) dengan perusahaan. Dalam hal pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit secara keseluruhan petani menyatakan bahwa teknik peremajaan kebun sawit yang diinginkan adalah dengan teknik tebang ulang total. Walaupun pembangunannya agak terasa berat serta pendapatan dari perkebunan kelapa sawit terhenti atau putus selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi untuk perawatan sedikit aman dari gangguan serangan hama. Biasanya hama akan banyak jika proses peremajaan sawit dengan penyuntikan batang pohon sawit hingga mati.

Sementara jika dilihat dari kebun sawit rakyat yang sudah diremajakan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Peremajaan kebun kelapa sawit dilakukan dengan teknik tumbang habis semuanya, maka pada saat ini petani tidak lagi memiliki sumber penghasilan dari lahan yang sedang diremajakan tersebut sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak adanya persiapan yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan baik sandang maupun pangan dalam rentang waktu kebun sawitnya belum bisa dipanen, tentu saja petani sangat kesulitan, mereka terpaksa mencari nafkah untuk keluarganya dengan beraktifitas sebagai supir, berjualan, buruh tani di desa lain yang terdekat dengan desanya.

Adapun upaya yang telah dilakukan kelompok tani memfasilitasi petani dengan memberi informasi dan pengetahuan tentang biaya yang diperlukan untuk melakukan peremajaan karena tanaman yang sudah tua tidak produktif lagi atau panennya makin lama makin sedikit dengan kata lain biaya pupuk untuk mendapatkan hasil panen tidaklah menguntungkan lagi. Sehingga perlu menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil panen saat ini untuk ditabung. Upaya lain adalah memberikan informasi tentang manfaat dari tanaman sela, selama masa tunggu memberikan informasi dalam tunggu kebun yang diremajakan sampai panen untuk berusaha bidang perikanan, peternakan dan lainnya.

C. Kesiapan Petani Dalam Menghadapi Masa Tunggu

Masa tunggu merupakan masa dimana lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah tua telah diremajakan untuk ditanam dengan tanaman kelapa sawit yang baru sampai dengan tanaman perkebunan tersebut menghasilkan atau petani sudah mendapatkan penghasilan dari usaha tanaman kelapa sawit yang diremajakan tersebut. Selama masa tersebut berarti praktis petani tidak memperoleh pendapatan dari lahan yang diremajakan. Namun petani harus tetap melakukan pengeluaran terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, tidak semua petani memiliki sumber penghasilan lainnya yang memadai untuk dapat menjaga pola konsumsinya. Kondisi ini tentunya menjadi masalah bagi petani dalam dihadapi masa tunggu. Pola konsumsi selama ini yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan petani pada saat masih produktif akan sulit untuk dirubah dalam waktu seketika. Maka, harapan terbesar menutupi *dissaving* adalah dari sumber pendapatan selain lahan perkebunan yang sedang diremajakan.

Tabel 7 : Sumber Pendapatan yang Saat ini dimiliki sebagai persiapan untuk menghadapi masa tunggu

Keterangan	Frequency	Percent	Rata-rata pendapatan
Tidak Memiliki Lahan Usaha Lainnya	17	14,17	0
Kebun Buah-Buahan dan Sayuran	10	8,33	1.895.000
Kebun Kelapa Sawit	58	48,33	3.199.296
Kebun Karet	9	7,50	588.889
Palawija	12	10,00	779.167
Lahan Peternakan dan perikanan	5	4,17	1.400.000
Usaha Perdagangan/Industri/Jasa	4	3,33	1.550.000
Rumah Sewa/Bangunan Lainnya	2	1,67	1.750.000
PNS/Karyawan Swasta	3	2,50	1.800.000
Total	120	100,00	

Sumber : Diolah dari data lapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada umumnya petani telah memiliki sumber pendapatan usaha lain yang dapat dijadikan sumber pendapatan ketika peremajaan kebunnya dilakukan. Namun demikian, tidak seluruh petani memiliki kegiatan usaha yang dapat memberikan sumber penghasilan ketika dilakukan peremajaan. Jumlah petani yang tidak memiliki lahan usaha lainnya sebanyak 17 responden atau 17,00%. Pada umumnya petani secara sadar sudah memikirkan bahwa masa peremajaan kebun kelapa sawit mereka yang telah tua akan datang, sehingga mereka telah mempersiapkan berbagai usaha alternatif yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Alternatif usaha yang dipilih oleh petani pada umumnya (48,33%) adalah usaha perkebunan kelapa sawit. Pemeliharaan usaha kelapa sawit ini pada lahan usaha lainnya tentunya dengan pertimbangan bahwa mereka telah memiliki pengalaman yang cukup dalam usaha kelapa sawit dan usaha tersebut saat ini masih memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi petani. Rata-rata pendapatan usaha kelapa sawit tersebut setiap bulannya mampu memberikan penghasilan sebesar Rp. 3.199.296. Selain kelapa sawit, sebanyak 10% responden memiliki usaha pertanian berupa lahan palawija terutama dikembangkan pada lahan pekarangan. Usaha pertanian palawija tersebut rata-rata mampu memberikan penghasilan sebesar Rp. 799.167.

Para petani dalam menghadapi masa tunggu masih memiliki alternatif usaha pertanian lainnya. Jenis usaha pertanian lainnya yang saat ini dimiliki petani dan dapat menjadi sumber penghasilan pada masa tunggu adalah usaha kebun buah-buahan dan sayuran yang dimiliki sebanyak 8,33% petani responden. Usaha tani buah-buahan dan sayuran rata-rata mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 1.895.000. Kegiatan usaha pertanian perkebunan yang banyak digeluti dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pada masa tunggu adalah perkebunan karet (7,50%). Dari usaha perkebunan karet rata-rata petani dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp. 588.889. Usaha peternakan dan perikanan (4,13%) dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 1.400.000. Usaha diluar pertanian, antara lain usaha perdagangan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.550.000. Rumah sewa (1,67%) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.750.000 dan PNS/Karyawan swasta (2,50%) dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.800.000.

Sementara itu, ketika kebun kelapa sawit diremajakan berarti pekerjaan petani akan hilang. Mau tidak mau petani harus mencari jenis pekerjaan yang baru atau tetap bekerja pada pekerjaan saat ini namun tidak berkaitan dengan kebun yang diremajakan. Begraund pekerjaan yang selama ini adalah berada pada sektor pertanian hal ini membuat para petani dalam memilih alternatif pekerjaan lainnya juga tidak jauh berbeda dengan keahlian yang dimiliki selama ini. Walaupun diantara petani masih ada yang menyatakan belum tahu (8,33%) apa jenis pekerjaan yang akan digelutinya apabila peremajaan jadi dilaksanakan. Sebanyak 31,67% petani responden memilih alternatif pekerjaan sebagai petani kebun sawit/karet/salak dan lain-lain serta beternak merupakan alternatif pilihan pekerjaan yang dilakukan oleh 8,33% petani responden.

Tabel 8 : Alternatif Pekerjaan yang dipilih petani dalam menghadapi masa tunggu

Keterangan	Frequency	Percent
Belum Tahu	10	8,33
Buruh Tani/Bangunan	29	24,17
Supir	6	5,00
Berdagang/Bengkel/Jasa	14	11,67
Bertani Kebun Sawit/Karet/Salak dll	38	31,67
PNS/Karyawan	13	10,83
Beternak	10	8,33
Total	120	100,00

Sumber : Diolah dari data lapangan

Tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang pada umumnya masih rendah menyebabkan mereka tidak banyak memiliki alternatif untuk memilih pekerjaan. Selain memutuskan untuk bertani kebun sawit/karet/salak pada umumnya petani memilih alternatif jenis pekerjaan yang mudah dilakukan dan tidak terlalu membutuhkan skill khusus, misalnya menjadi buruh tani/bangunan (24,17%). Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus seperti supir, PNS/Karyawan masing-masing sebanyak 5% dan 10,83%.

Besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga petani kelapa sawit pada masa tunggu dapat tercermin dari besarnya pengeluaran rumah tangga pada saat ini. Pengeluaran rumah tangga petani kelapa sawit rakyat dapat dikelompokkan dalam pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dalam hal ini pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan pengeluaran bersifat tidak rutin yang dikeluarkan bukan setiap hari dalam hal ini adalah pengeluaran untuk kebutuhan non bahan makanan.

Struktur pengeluaran kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani kelapa sawit rakyat yang memasuki masa peremajaan, terutama konsumsi padi-padian sebesar 8,63%. Gaya hidup yang kurang sehat masih ditunjukkan oleh para petani yang tercermin dari masih tingginya (7,90%) pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih. Kesadaran keluarga petani kelapa sawit rakyat akan gizi makanan juga meningkat yang tercermin dari pengeluaran untuk ikan, daging, telur dan susu dengan proporsinya masing-masing sebesar 3,09%, 2,63%, dan 3,11%.

Tabel 9 : Rataan Jenis Pengeluaran Bahan Makanan Petani Kelapa Sawit Per Bulan

No	Keterangan	Pengeluaran	%
1	Padi-padian	270.198	8,63
2	Umbi-Umbian	43.533	1,39
3	Ikan	96.667	3,09
4	Daging	82.446	2,63
5	Telur dan Susu	97.485	3,11
6	Sayur-Sayuran	58.467	1,87
7	Kacang-Kacangan	37.750	1,21
8	Buah-Buahan	130.317	4,16
9	Minyak dan Lemak	141.522	4,52
10	Bahan Minuman	61.471	1,96
11	Makan dan Minuman Jadi	96.550	3,08
12	Tembakau dan Sirih	247.208	7,90
	Bahan Makanan	1.363.614	43,57

Sumber : Diolah dari data lapangan

Meningkatnya perekonomian keluarga telah turut meningkatkan pola konsumsi rumah tangga petani kelapa sawit terutama untuk pengeluaran non bahan makanan. Meningkatnya proporsi pengeluaran untuk non bahan makanan dapat juga dijadikan sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani kelapa sawit. Namun demikian, pola konsumsi non bahan makanan yang meningkat akan dapat menimbulkan permasalahan yang serius bagi rumah tangga petani kelapa sawit dalam menghadapi masa tunggu. Standar hidup yang selama ini dinikmati mungkin mampu diturunkan bahkan dihilangkan dalam waktu relatif singkat.

Besar dan luasnya rumah yang dimiliki petani kelapa sawit dapat mencerminkan status sosial maupun ekonomi di mata masyarakat. Dengan meningkatnya perekonomian keluarga petani cenderung untuk memperbaiki rumahnya sehingga akan meningkatkan pengeluaran untuk perumahan (12%). Seiring berjalannya waktu anak-anak petani kelapa sawit rakyat telah memasuki usia sekolah baik dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dengan demikian kebutuhan pengeluaran untuk biaya pendidikan juga akan semakin besar (24,32%). Kondisi fisik petani yang semakin tua juga membutuhkan biaya kesehatan cukup besar 3,71%.

Tabel 10 : Rataan Jenis Pengeluaran Non Bahan Makanan Petani Kelapa Sawit Per Bulan

No	Keterangan	Pengeluaran	%
1	Perumahan	405.917	12,97
2	Listrik	101.401	3,24
3	Telepon	26.469	0,85
4	Transportasi	122.131	3,90
5	Pendidikan	761.292	24,32
6	Kesehatan	116.058	3,71
7	Rekreasi/ Wisata	120.250	3,84
8	Sosial/Asuransi/Pesta dll	112.708	3,60
	Non Bahan Makanan	1.766.225	56,43

Sumber : Diolah dari data lapangan

5.2. Pembahasan

Kondisi lahan kebun petani kelapa sawit rata-rata sudah diatas 25 tahun dan sudah wajib untuk dilakukan peremajaan. Rata-rata setiap rumah tangga petani pada umumnya (70,83%) memiliki luas lahan kebun kelapa sawit yang telah memasuki usia tua sekitar 1- 2 Ha dengan bukti kepemilikan pada umumnya sertifikat (93,33%) dan SKT dari camat/lurah (5,83%), serta bukti lainnya (0,83%). Berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor : SE- 9 /BL/2012 Tanggal : 12 Juli 2012 aset dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu aset tanaman perkebunan dan aset non tanaman perkebunan. Aset Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit adalah tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan secara komersial pada suatu lahan tertentu dan dikelola berdasarkan teknis budidaya yang berlaku umum pada suatu tempat tertentu. Aset tanaman perkebunan yang dimiliki petani saat ini telah memasuki usia tua dan harus di remajakan. Dengan demikian, apabila diremajakan aset tanaman perkebunan dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memberikan sumber penghasilan. Petani masih memiliki aset yang lain yaitu aset non-Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit seperti tanah, bangunan dan infrastruktur, mesin dan peralatan pendukung perkebunan, kendaraan dan alat berat, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya. Aset non tanaman pangan inilah yang turut menentukan kesiapan modal petani dalam menghadapi peremajaan kebun kelapa sawitnya selain dari modal pihak lain.

Lahan merupakan aset yang paling berharga bagi petani. Lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau pada umumnya dikembangkan melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Perkebunan Inti Plasma, serta swadaya murni. Perkebunan Inti Rakyat merupakan program pemerintah yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk membina masyarakat transmigran untuk menghasilkan komoditas perkebunan tertentu. Sedangkan Perkebunan Inti Plasma merupakan program pemerintah yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk membina masyarakat menghasilkan komoditas perkebunan tertentu.

Pada umumnya usia petani kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki usia tua tidaklah dalam usia muda lagi. Sebagian besar (69,17%) usia mereka sudah diatas 41 tahun. selain itu, dengan tingkat pendidikan petani kelapa sawit pada umumnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah menyebabkan mereka relatif lebih cenderung untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang kasar. Menurut Saputri dan Rejekiningsih (2010) ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat seiring dengan meningkatnya upah pekerja. Diadakannya secara rutin pelatihan kewirausahaan kepada penduduk. Memaksimalkan sektor-sektor yang potensial dalam menyerap tenaga kerja. Memanfaatkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan perluasan penyerapan tenaga kerja. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai agar penduduk produktif tetap bekerja serta diupayakan agar penetapan UMK lebih besar dari pada KHL.

Selama ini para petani perkebunan kelapa sawit rakyat yang memasuki masa usia tua pada umumnya telah tergabung dalam kelompok tani sekaligus sebagai anggota koperasi. Berbagai upaya telah dilakukan petani bersama pengurus koperasi dan pemerintah desa dalam menghadapi peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Namun demikian pada umumnya koperasi dan kelompok tani serta petani belum ada keputusan yang bersifat kolektif tentang bagaimana model peremajaan yang disepakati bersama.

Masalah yang muncul ketika koperasi memanfaatkan dana revitalisasi adalah lahan kebun kelapa sawit rakyat yang dilakukan peremajaan tidak boleh ditanami tanaman sela, karena dianggap dapat merusak tanaman sawit. Oleh karena itu, dari pihak pemerintah daerah mencoba dengan pola pekarangan baik ikan lele atau ternak apa yang bisa tanaman lain yang bisa menambah penghasilan petani. Namun demikian, sebagian besar petani tetap menginginkan adanya tanaman tumpang sari dilahan yang diremajakan.

Menurut Iriantini (2014) untuk tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat yang telah tua perlu segera dilakukan peremajaan. Model yang diterapkan adalah teknis konvensional dengan pola tumpang sari. Sumber Pendapatan Alternatif Pemanfaatan lahan sela 50 % dari luas lahan yang diremajakan, merupakan pilihan alternatif yang sangat tepat. Secara teknis tidak dapat diragukan lagi bahwa lahan tumpang tanaman tua masih sangat produktif dengan sentuhan teknologi sederhana. Para petani di lokasi pengembangan model-model peremajaan kelapa sawit secara intensif memanfaatkan lahan sela tersebut dengan menggunakan tanaman tumpang sari seperti jagung, kedele, kacang tanah dan tanaman hortikultura.

Kemampuan untuk meremajakan kebun kelapa sawit secara mandiri terutama sangat ditentukan oleh kemampuan modal yang dimiliki oleh petani kelapa sawit rakyat. Informasi yang diperoleh dari pengurus koperasi menyebutkan bahwa secara ekonomi sekitar 60% petani anggota koperasi mampu untuk melakukan peremajaan secara mandiri sedangkan sekitar 40% petani anggota koperasi tidak mampu untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawitnya secara mandiri. Namun demikian Menurut Hadi (2012) bahwa replanting yang diadakan secara perorangan merupakan suatu ancaman ketika dilaksanakan replanting karena akan mengakibatkan performan kebun tidak standar sehingga produktivitas menjadi rendah.

Masalah yang dikhawatirkan koperasi adalah apabila pola manajemen pengelolaan kebun 100% oleh perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan peran koperasi sudah tidak perlu lagi/berkurang, ekonomi masyarakat sudah tidak ada, mungkin tabungan anggota ditarik, perbankan sudah tidak mau memberikan modal karena tidak ada dukungan ekonomi dari anggota. Harapan koperasi, jika memang ada dukungan dana revitalisasi dan harus ada avalis, maka pola manajemen pengelolaan kebun tidak 100% dikelola perusahaan. Koperasi harus tetap diberikan peran yang luas seperti mungkin akan duduk bersama untuk kesepakatan bersama antara koperasi dengan perusahaan mitra yang saling menguntungkan.

Menurut Pambela, dkk (2013) faktor internal yang sangat mempengaruhi dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah meliputi (1) lahan plasma telah menjadi milik petani, (2) petani merupakan anggota kelompok tani dan KUD, (3) petani memiliki tabungan kelompok dan memiliki IDAPERTABUN, (4) hubungan petani dengan perusahaan inti yang masih kuat, (5) dan pengalaman petani dalam budidaya kelapa sawit cukup tinggi. Sedangkan faktor kelemahan yang penting untuk di minimalisir sebagai berikut (1) Petani Tidak Memiliki Modal Yang Mencukupi Untuk Melakukan Peremajaan (2) Kurangnya Pengetahuan Petani Tentang Umur Ekonomis Kelapa Sawit dan (3) Petani kehilangan pendapatan selama 4 tahun kedepan. Kemudian faktor peluang sebagai berikut (1). bantuan dari perbankan sebagai pemegang dana (2) perusahaan inti yang menjadi mitra bagi petani. (3). ikut berperannya pemerintah dalam peremajaan.